

TESIS

REGULASI LABELISASI HALAL ATAS PRODUK AIR MINUM DALAM KEMASAN BERSTANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)

Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Magister Hukum Dalam Program Studi Magister Ilmu Hukum
Pada Universitas Wijaya Kusuma Surabaya



Oleh :

RUDY HARTONO
NPM : 15310009

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
2017

LEMBAR PENGESAHAN
REGULASI LABELISASI HALAL ATAS PRODUK AIR MINUM DALAM
KEMASAN BERSTANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)

Diajukan oleh:

RUDY HARTONO

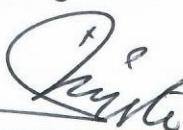
NPM. 15310009

TESIS INI TELAH DISETUJUI UNTUK DIUJI

Tanggal

Oleh

Pembimbing I



DR. EDI KRISHARYANTO, S.H., M.H.

Pembimbing II



DR. JOKO NUR SARIONO S.H., M.H.

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya



DR. ARI PURWADI, SH., M.Hum.,

TESIS

**REGULASI LABELISASI HALAL ATAS PRODUK AIR MINUM DALAM
KEMASAN BERSTANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)**

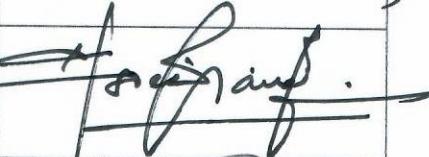
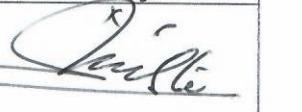
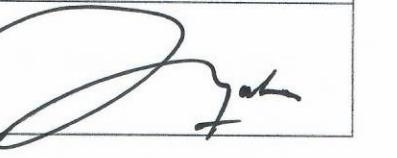
Dipersiapkan dan disusun oleh:

RUDY HARTONO

NPM. 15310009

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Pada tanggal 26 Juli 2017

Susunan Dewan Penguji

DR. ARI PURWADI, SH., M.Hum.,	KETUA	
DR. SUHANDI S.H.,M.HUM	ANGGOTA	
DR. EDI KRISHARYANTO, S.H., M.H.	ANGGOTA	
DR. JOKO NUR SARIONO S.H., M.H.	ANGGOTA	

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister.

Tanggal 26 Juli 2017

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

DR. ARI PURWADI, SH., M.Hum.,

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kasih karuniaNya sehingga memungkinkan peneliti untuk menyusun dan menyelesaikan tesis ini, penulis menyadari tesis ini masih banyak kekurangan yan perlu disempurnakan karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan peneliti sehingga memerlukan saran dan kritik dari berbagai pihak yang berkepentingan dengan tesis ini termasuk para peneliti berikutnya.

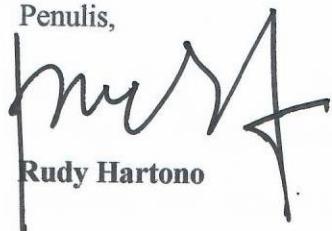
Pada kesempatan ini peneliti menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Sri Harmadji ,dr., Sp.THT-KL (K), selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
2. Bapak Bambang Yunarko, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
3. Bapak Dr. Ari Purwadi S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum.
4. Bapak Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H., selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Joko Nur Sariono S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan dorongan dengan sabar.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu serta wawasan yang bermanfaat selama pendidikan.
6. Istri dan anakku tercinta yang selalu setia menemani dalam menyelesaikan tesis ini

Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri semoga tesis ini dapat menambah *khazanah* keilmuan dan semoga dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Surabaya,

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Rudy Hartono".

Rudy Hartono

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RUDY HARTONO**

NPM : **15310009**

Alamat : **Jl. Candi Lontar Blok 42L/5, Surabaya**

No. Tlp (HP) : **081231962559**

Menyatakan bahwa tesis ini yang berjudul "**Regulasi Labelisasi Halal Atas Produk Air Minum Dalam Kemasan Berstandar Nasional Indonesia (SNI)**" adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain. Apabila ternyata nantinya tesis tersebut ditemukan adanya unsure plagiarism maupun autoplagiarisme, saya siap menerima saksi akademik yang akan dijatuahkan oleh fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 20 Juni 2017

Yang menyatakan



Rudy Hartono

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian	10
1. Manfaat Teoritis.....	10
2. Manfaat Praktis	10
E. Tinjauan Pustaka	11
1. Nilai Kekuatan Hukum	11
2. Teori Perlindungan Hukum	14
3. Konsep Standarisasi	17
4. Konsep Labelisasi	18
5. Konsep Halal	23
6. Konsep Kadaluwarsa	25
F. Metode Penelitian.....	32
1. Tipe Penelitian	32
2. Metode Pendekatan	32
3. Sumber Bahan Hukum (<i>Legal Sources</i>)	33
a. Bahan Hukum Primer	33
b. Bahan Hukum Sekunder	34
c. Bahan Hukum Tersier	34
G. Sistematika Pertanggungjawaban	34
BAB II PROSEDUR PENDAFTARAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) ATAS AIR MINUM DALAM KEMASAN	
A. Prosedur Pendaftaran Standar Nasional Indonesia (SNI).....	36
B. Standar Nasional Indonesia (Sni) Atas Air Minum Dalam Kemasan.....	42
C. Kekuatan Hukum Regulasi Standar Nasional Indonesia (SNI).....	44
D. Kekuatan Hukum Regulasi Standar Nasional Indonesia (SNI) Atas Air Minum Dalam Kemasan.....	48
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM REGULASI STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) ATAS LABELISASI HALAL	
A. Kedudukan Labelisasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam	55

B. Akibat Hukum Bagi Pelaku Usaha Yang Mencantumkan Label Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman.....	60
--	----

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74

DAFTAR BACAAN

ABSTRAK

Standar Nasional Indonesia adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dan berlaku secara nasional. Sertifikat halal adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat atau Propinsi tentang halalnya suatu produk makanan, minuman, obat-obatan dengan tujuan kesehatan dan kosmetika yang diproduksi oleh perusahaan setelah diteliti dan dinyatakan halal oleh LPPOM MUI. Bagi konsumen, sertifikat halal memiliki beberapa fungsi. Pertama, terlindunginya konsumen muslim dari mengonsumsi pangan, obatobatan dan kosmetika yang tidak halal; kedua, secara kejiwan perasan hati dan batin konsumen akan tenang; ketiga, mempertahankan jiwa dan raga dari keterpurukan akibat produk haram; dan keempat, akan memberikan kepastian dan perlindungan hukum. Salah satu contoh bentuk standarisasi nasional adalah air minum dalam kemasan. Air merupakan kebutuhan mendasar manusia. Air Minum Dalam Kemasan diartikan sebagai air yang telah diproses, tanpa bahan pangan lainnya dan bahan tambahan pangan, dikemas, serta aman untuk diminum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis prosedur pendaftaran standar nasional Indonesia (SNI) atas air minum dalam kemasan dan untuk menganalisis dan menemukan bentuk perlindungan hukum dalam regulasi standar nasional Indonesia (SNI) atas labelisasi halal berdasarkan hukum positif di Indonesia.

Penelitian ini termasuk yuridis normatif dan menjabarkan secara yuridis deskriptif dengan pendekatan undang-undang yaitu meneliti azas-azas hukum terkait hubungan peraturan yang satu dengan lainnya serta keterkaitannya dengan fakta yang terjadi. Data yang diperoleh kemudian dianalisa dengan metode deskriptif analitis yaitu dengan menggunakan aturan hukum yang berlaku berdasar pada teori keadilan.

Hasil dari penelitian ini adalah pertama Regulasi teknis berisi tentang aturan yang wajibkan untuk suatu produk tertentu untuk memakai standar tertentu yang telah ada. Hal ini disebabkan pengadopsian SNI menjadi regulasi teknis lebih mudah diterima oleh pelaku pasar karena SNI dirumuskan bersama oleh stake holder (produsen, konsumen, regulator dan para pakar) dan proses perumusan SNI melalui sejumlah tahap untuk memfasilitasi optimasi antara pendekatan kepakaran dan pendekatan konsensus. Selain itu SNI didukung sistem penilaian kesesuaian yang sesuai dengan standar praktik internasional dan telah mendapatkan pengakuan multilateral melalui sejumlah forum akreditasi regional dan internasional. Namun regulasi teknis ada juga yang berisi tentang spesifikasi tertentu terhadap suatu produk, jadi peraturan tersebut mengatur secara detil tentang suatu produk. Kedua, Konsekuensi atau akibat hukum bagi pelaku usaha yang mencantumkan label halal yang tidak prosedural dapat dinyatakan telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

Kata Kunci: *SNI, standarisasi, label halal*

ABSTRACT

The Indonesian National Standard is the standard set by the National Standardization Agency and applies nationally. Halal certificate is a certificate issued by Majelis Ulama Indonesia (MUI) of Central or Provincial concerning halal of a food, beverage, medicinal product with health and cosmetic purpose which produced by company after being investigated and declared halal by LPPOM MUI. For consumers, halal certificates have several functions. First, the protection of Muslim consumers from consuming food, drugs and cosmetics are not kosher; Secondly, the hearts and hearts of consumers will calm down; Third, maintaining the soul and body from the downturn caused by illicit products; And fourth, will provide legal certainty and protection. One example of the form of national standardization is bottled drinking water. Water is a basic human need. Drinking Water In Packaging is defined as processed water, no other food and food additives, packaged, and safe to drink. The purpose of this study was to analyze Indonesia National Standards Registration (SNI) procedures for bottled drinking water and to analyze and find the form of legal protection in the regulation of Indonesian National Standard (SNI) on halal labeling based on positive law in Indonesia.

This study includes normative juridical and describes the juridical descriptive with the approach of the law that examines the legal principles related to the relationship of the rules with each other and its relation to the facts that occur. Data obtained then analyzed by analytical descriptive method that is by using the rule of law applicable based on the theory of justice.

The results of this study are the first Technical Regulations containing the rules that require for a particular product to use certain existing standards. This is because the adoption of SNI into technical regulation is more easily accepted by market participants because SNI is formulated jointly by stake holders (producers, consumers, regulators and experts) and SNI formulation process through several stages to facilitate optimization between approaches of expertise and consensus approach. In addition, SNI is supported by conformity assessment system in accordance with international practice standards and has received multilateral recognition through a number of regional and international accreditation forums. However, technical regulations also contain specific specifications of a product, so the rules regulate in detail about a product. Second, the legal consequences or consequences for business actors that include non-procedural kosher labels may be declared to have violated the provisions of the laws and regulations contained in Law no. 8 of 1999 on Consumer Protection, Law Number 7 Year 1996 regarding Food and Government Regulation Number 69 Year 1999 on Food Label and Advertisement.

Keywords: *SNI, standarisasi, label halal*